

SKRIPSI

**RELASI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAN MASYARAKAT DALAM
MELAKSANAKAN GERAKAN *ZERO* SAMPAH**



Disusun Oleh:

YOHANES DEBINIUS JOGNES

18520004

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU

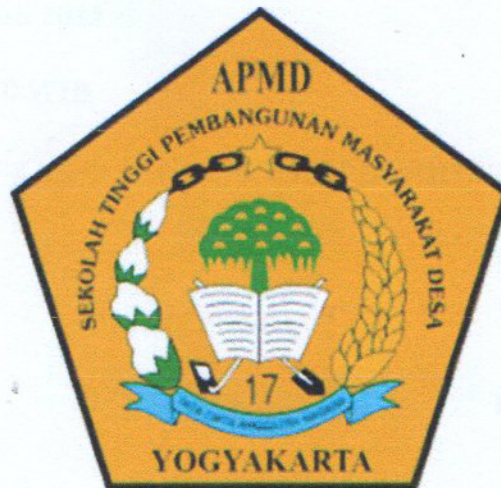
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2023

SKRIPSI

**RELASI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DAN MASYARAKAT DALAM
MELAKSANAKAN GERAKAN *ZERO* SAMPAH**



Disusun Oleh:

YOHANES DEBINIUS JOGNES

18520004

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

YOGYAKARTA

2023



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 18 Juli 2023
Pukul : 12.30 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD"APMD" Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

1. Analius Gawa, S.IP., M.Si

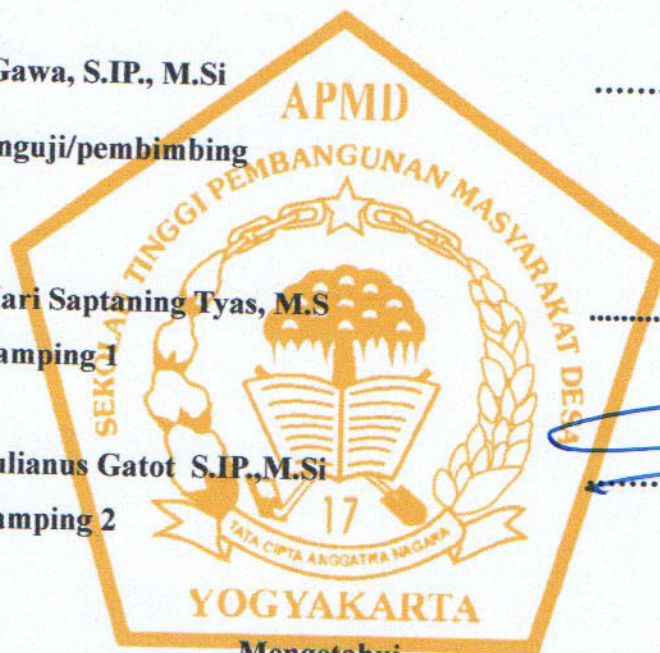
Ketua penguji/pembimbing

2. Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.S

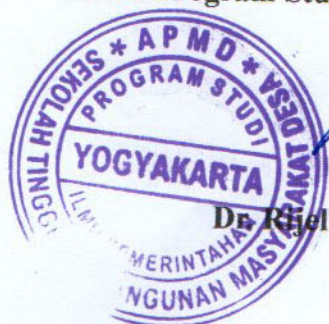
Penguji samping 1

3. Drs. R. Yulianus Gatot S.IP., M.Si

Penguji samping 2



Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan



Dr. Rigel Samaloisa

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yohanes Debinius Jognes

NIM : 18520004

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan skripsi yang berjudul “Relasi Pemerintah Kota Yogyakarta Dan Masyarakat Dalam Melaksanakan Kebijakan *Zero Sampah*”, dengan studi kasus di Kota Yogyakarta adalah benar-benar merupakan hasil kerja dan karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar sesuai dengan aslinya. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Juli 2023




Yohanes Debinius Jognes

INTISARI

Relasi Pemerintah Kota Yogyakarta Dan Masyarakat Dalam Melaksanakan Gerakan *Zero* sampah (Nol Sampah), Oleh Yohanes Debinius Jognes, tujuan penelitian ini berguna untuk mengetahui Bagaimana Relasi Pemerintah Kota Yogyakarta Dan Masyarakat Dalam Melaksanakan Gerakan *Zero* sampah (Nol Sampah). Permasalahan umum yang terjadi adalah Kurangnya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Kota Yogyakarta untuk melaksanakan kebijakan atau gerakan zero sampah. Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mendalam Relasi Pemerintah Kota Yogyakarta Dan Masyarakat Dalam Melaksanakan Gerakan *Zero* sampah (Nol Sampah). Rumusan masalah yang diajukan adalah Bagaimana Bagaimana Relasi Kekuasaan Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat Dalam Melaksanakan Gerakan *Zero* sampah. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan atau mendefinisikan Relasi Pelaksanaan Konsep *Zero* sampah di Kota Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam studi ini Sumber data dipilih secara purposive yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu, dengan mengelompokan Informan serta memberikan pertanyaan sesuai dengan kapasitasnya, untuk memudahkan peneliti mempelajari objek atau situasi sosial yang diteliti.

Hasil Penelitian menunjukkan permasalahan terkait Relasi Pemerintah Kota Yogyakarta Dan Masyarakat, ialah 1). Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan sosialisasi terkait pengelolaan dan pemilahan sampah organik dan anorganik tetapi jika hanya sekedar melakukan sosialisai saja tanpa menyediakan fasilitas sarana prasaran berupa tempat sampah dan melakukan kerjasama dan melakukan pendekatan yang kuat dengan bank sampah dengan memfasilitasi berupa kegiatan bank sampah. 2). Relasi yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta sudah cukup baik karna sudah melibatkan semua Instansi di Kota Yogyakarta tetapi tidak dilingkungan masyarakat mereka hanya sekedar melakukan kegiatan sosialisasi saja di tiap RT/RW padahal masyarakat berharap adanya fasilitas sarana prasarana berupa tempat di lingkungan masyarakat dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah masyarakat juga ikut melaksanakan dan mewujudkan zero sampah. 3). Tindakan ketidakpatuhan yang diterapkan Pemerintah Kota Yogyakarta cukup baik tetapi Pemerintah juga harusnya memberikan apresiasi jika masyarakat tekun melaksanakan zero sampah dengan mengadakan event kebersihan lingkungan dan melakukan suatu kegiatan yang menghiburkan masyarakat jangan hanya membuat kebijakan supaya orang patuh tetapi buatlah kebijakan dengan memperhatikan atau saling menguntungkan antara Pemerintah dan masyarakat.

Kata Kunci : Relasi, Pemerintah, Masyarakat, zero sampah

MOTTO

"Keyakinan lebih baik dari pada rencana apa pun"

"Nagato"

"Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari."

(Matius 6:34)

PERSEMBAHAN

1. Kepada Bapak Paskalis Mani dan Ibu Antonia Linut yang selalu berdoa dan selalu tabah membimbing saya dengan penuh kasih sayang terimakasih banyak atas semua pengorbanan kalian. Tuhan Yesus Selalu Memberkati.
2. Kepada Kakak Iren, Afri dan Adik Ica dan seluruh keluarga saya yang selalu memberi saya kekuatan dan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya ini. Terimakasih banyak Tuhan Yesus Memberkati.
3. Kepada Delviana Satriawati terima kasih karna selalu menemani dan membimbing saya selama di Jogja sehingga saya sampai di titik sekarang ini. Terimakasih Tuhan Yesus Memberkati “I LOVE YOU”.
4. Terima kasih banyak kepada dosen pembimbing saya Analius Gawa, S. IP, Msi yang dengan setia dan antusias memberikan bimbingan, arahan, dan pencerahan sehingga sangat membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Terima kasih banyak untuk Almamater tercinta Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang dengan caranya membantu saya baik dalam menyelesaikan tugas akhir ini maupun membantu saya dalam menunjang sehingga tercapainya cita-cita saya.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, atas segala berkat, bimbingan, penyertaan, cinta, dan kasih-Nya yang tiada ujungnya kepada penulis sehingga penyusunan skripsi yang berjudul “Relasi Pemerintah Kota Yogyakarta Dan Masyarakat Dalam Melaksanakan Gerakan *Zero Sampah*” dapat terselesaikan dengan baik.

Penulisan Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1 Ilmu Pemerintahan. Tentu saja terselesainya Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena dasar itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Bunda Maria dan Roh Kudus atas berkat, kasih dan perlindunganNya kepada penulis sehingga tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Diri sendiri, terimakasih karena mau terus bergerak dan berjuang dalam menorehkan sejarah hidup terutama dalam mencapai kesuksesan pada setiap target yang telah direncanakan demi masa depan yang baik.
3. Pak Analius Gawa, S. IP, Msi selaku selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir Skripsi yang telah membimbing dan membantu dengan sabar sehingga laporan Tugas Akhir Skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M. Si, selaku ketua STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mencari ilmu pengetahuan di STPMD “APMD” Yogyakarta.
5. Ibu Dra. Widati selaku dosen wali STPMD “APMD” Yogyakarta.
6. Kepada kampus sekaligus almamater STPMD “AMPD” yang sudah mendidik saya selama ini tetap jaya selalu.
7. Bagi semua Dosen dikampus STPMD “APMD” terima kasih telah mendidik dan memberi ilmu bagi saya.

8. Kepada teman-teman atau saudara saya di Jogja Yandi Deo, Anton Ahok, Rendi Magul, Gilberto Hadiman, Aldo, Hendi, Jesen Dula, Arifan Surya, Iyono Rahur, Eben, Jovin, Save, Aldus, Loje, Kuin, Tessy Janar.
9. Kepada keluarga besar Inkoparenta yang selalu membantu saya disaat suka dan duka.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat membuka diri untuk menerima kritikan dan saran dari pembaca demi mencapai kesempurnaan dan kebenaran yang semakin mendalam. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang sebagaimana yang diharapkan dalam dunia ilmiah dan akademik.

Yogyakarta, 27 Juli 2023



Yohanes Debinius Jognes

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
INTISARI	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Literatur Review	7
F. Kerangka Konseptual	12
1. Relasi Kekuasaan	12
2. Pemerintah	16
3. Masyarakat	17
4. Sampah	19

5. Zero Sampah	23
G. Metode Penelitian	25
BAB II.....	30
PROFIL KOTA YOGYAKARTA	30
A. Gambaran Umum Kota Yogyakarta.....	30
B. Sejarah Penataan Sampah dan Jumlah Depo dan Data Petugas Jaga di Kota Yogyakarta 32	
C. Kondisi Fisik Wilayah Kota Yogyakarta.....	35
D. Kondisi sosial ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat	37
BAB III	43
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Kondisi Eksistising Sistem Pengelolaan Sampah di Kota Yogyakarta.....	43
B. Strategi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mendorong kepatuhan warga terhadap Gerakan Zero Sampah.....	48
C. Bagaimana Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menerapkan relasi dua arah kepada warga di wilayah Kota Yogyakarta	54
D. Tindakan ketidakpatuhan bagi masyarakat jika tidak patuh melaksanakan gerakan zero sampah di Kota Yogyakarta.....	59
BAB IV	65
KESIMPULAN DAN SARAN.....	65
A. KESIMPULAN.....	65
B. SARAN.....	66

DAFTAR PUSTAKA.....69

DAFTAR TABEL

Table 1.1 Daftar Nama Informan	26
Table 2.1 Data Wilayah Adminitrasi Kota Yogyakarta Tahun 2021	36
Tabel 2. 2 Pertumbuhan Penduduk Kota Yogyakarta periode 2016-2021.....	38
Tabel 2.3 Pertumbuhan penduduk tahun 2020.....	39
Tabel 2.4 rasio ketergantungan periode 2016-2021 Kota Yogyakarta.....	41
Tabel 3. 1 Rekapitulasi timbulan sampah Kota Yogyakarta 2021.....	45
Tabel 3.2 Jumlah SDM pengelola persampahan dari DLH Kota Yogyakarta.....	47
Tabel 3.3 Target pemungutan retribusi persampahan.....	49
Tabel 3.4 Capaian dan realisasi pendapatan dari pemungutan retribusi kebersihan selama 4 tahun....	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kerusakan lingkungan dan permasalahannya merupakan kondisi kemanusiaan di lingkungan regional, nasional dan global. Pembangunan, pertumbuhan penduduk, teknologi baru, gaya hidup dan konsumsi merupakan rangkaian dari apa yang dianggap sebagai masalah lingkungan di beberapa kalangan. Dahulu masyarakat menduga bahwa masalah lingkungan lebih banyak dipengaruhi oleh faktor alam seperti iklim yang meliputi suhu, curah hujan, kelembaban, tekanan atmosfer, topografi, geografi, dan lain-lain. Baru-baru ini, telah disadari bahwa aktivitas manusia mempengaruhi iklim, dan aktivitas manusia juga secara signifikan mempengaruhi iklim dan lingkungan. Manusia memiliki berbagai jenis kebutuhan, baik kebutuhan pokok, primer maupun sekunder. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut manusia memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Semakin banyak jumlah manusia, semakin banyak pula sumber daya alam yang digali. Kerusakan lingkungan akibat pencemaran terjadi di mana-mana. Manusia melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya berbagai kegiatan yang manusia lakukan selalu menimbulkan limbah atau sampah.

Hal ini menimbulkan konsekuensi berupa permasalahan lingkungan, termasuk kegiatan ekonomi yang menghasilkan limbah. Sampah yang tidak dikelola dengan baik menimbulkan berbagai masalah lingkungan menjadi kotor, menimbulkan berbagai penyakit, bahkan dapat menyebabkan terjadinya banjir. Sampah adalah buangan yang dihasilkan proses produksi baik di rumah tangga (household) maupun di industri. UU Pengelolaan Sampah No. 18 Tahun 2008 menyatakan bahwa sampah

adalah sisa kegiatan manusia sehari-hari atau proses alam yang berbentuk padat atau setengah padat sebagai bahan organik atau anorganik yang dapat terurai atau tidak dapat terurai dianggap tidak berguna dan dibuang ke lingkungan. Oleh karena itu sampah ini telah menjadi salah satu masalah banyak negara dan dunia karena sifatnya yang sulit terurai, namun kejadiannya meningkat setiap tahun. Generasi limbah sepanjang 2015 berdasarkan data dari *ScienceMag* (Y Hendra. 2016, hal 2-15) sampah di dunia mencapai 381 juta ton per tahun. Masalah sampah tidak hanya bersifat nasional, namun karena percepatan urbanisasi dan pertumbuhan penduduk, bahkan telah menjadi masalah global. Bank Dunia (2008) melaporkan bahwa timbulan sampah tahunan global diperkirakan mencapai 3,4 miliar ton selama 30 tahun ke depan. 2,01 miliar ton pada tahun 2016. Seluruh negara di kawasan juga dituntut untuk bertindak mengatasi masalah sampah ini.

Jumlah sampah meningkat secara geometris, sedangkan ketersediaan TPA mengikuti tren aritmatika. Akibatnya, umur TPA berkurang karena tidak bisa lagi menampung sampah yang ada. Rendahnya teknologi dan lemahnya infrastruktur telah menimbulkan masalah sampah yang sangat pelik, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Sebagai pemangku kepentingan, Negara memiliki kewajiban untuk menerapkan sistem pengelolaan sampah yang efektif untuk mengatasi permasalahan sampah. Selain itu, diharapkan peran masyarakat untuk mengatasi permasalahan tersebut, karena ketidaktahuan masyarakat akan permasalahan yang diakibatkan oleh sampah sangat berdampak pada buruknya pengelolaan sampah.

Indonesia merupakan negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan tentunya tidak luput dari permasalahan dan pengelolaan sampah yang mencapai 200.000 ton per hari (Y Hendra. 2016, hal 2-15). Pada tahun 2018, jumlah penduduk Indonesia mencapai 265,3 juta jiwa bahkan jumlahnya bertambah. Pertumbuhan

juga dialami dalam pertumbuhan ekonomi, dimana bagian terbesar diberikan oleh industri. Penelitian yang dipublikasikan di jurnal Science pada 13 Februari 2015 mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan penghasil sampah plastik terbesar kedua di lautan. Sementara itu, ketidakseimbangan antara pembuangan (limbah yang dihasilkan), pengangkutan dan penanganan semakin memperumit masalah ini, terutama di kota-kota besar di Indonesia. Peraturan tentang pengelolaan sampah dan permasalahan sampah tertuang dalam UU Pengelolaan Sampah No. 18 Tahun 2008 dan turunannya serta UU Perlindungan Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah No. 32 Tahun 2009. Keputusan Presiden No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Perkotaan (SRT) dan Persampahan Perkotaan (SSRT). Tujuan pemerintah adalah mengurangi jumlah sampah kota dan sampah rumah tangga hingga 30 persen pada tahun 2025 dan mengolahnya hingga 70 persen. (Presiden Republik Indonesia, 2008, 2009, 2017). Menurut UU Pengelolaan Sampah No. 18 Tahun 2008, disebutkan bahwa sampah meliputi:

1.Sampah Rumah Tangga

2.Sampah Sejenis Rumah Tangga

3.Sampah Spesifik

Di Kota Yogyakarta, masalah sampah sudah tidak bisa dianggap enteng lagi. Menurut Lembaga Independen Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 18.851,19 ton sampah yang sampai ke TPS Piyungan pada Desember 2020. Dibandingkan November 2020, mencapai 16.767,83 ton, naik 2.083,76 ton. Kota Yogyakarta sebesar 24,29 ton (di Republik Fauzan, 2020). Pada Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Perda Kota Yogyakarta 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah, Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia

atau proses alam yang berbentuk padat. terdiri dari sampah domestik dan rumah tangga.

Namun yang menjadi Permasalahan di Kota Yogyakarta apakah konsep pelaksanaan gerakan *Zero* sampah sudah benar-benar diterapkan dan dijalani oleh masyarakat. Dengan adanya kebijakan *Zero* Sampah ini diharapkan Pemerintah Kota Yogyakarta dan masyarakat Yogyakarta dapat bekerja sama dalam melaksanakan gerakan *Zero* sampah agar dapat mengurangi angka jumlah sampah yang ada di Kota Yogyakarta baik itu Sampah Rumah Tangga, Sampah Sejenis Rumah Tangga, Dll. Kebijakan *Zero* Sampah ini sudah diberlakukan pada 3 Januari 2023 kebijakan *Zero* Sampah ini juga sudah berdasarkan Surat Edaran (SE) Walikota Yogyakarta Nomor 660/6123/SE/2022 Kebijakan *Zero* Sampah ini dibuat diharapkan dapat mengurangi angka jumlah penumpukan sampah di Kota Yogyakarta dan untuk mengurangi jumlah volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Surat Edaran (SE) Walikota Yogyakarta tentang *Zero* Sampah sudah didasarkan pada Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah telah diubah dengan Peraturan Daerah Yogyakarta (PERDA) Nomor 1 Tahun 2022, diatur bahwa pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mengelola sampah yang timbul dari aktivitasnya sehari-hari. (Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta).

Dalam mewujudkan kebijakan gerakan konsep *Zero* sampah ini peran pemerintah sangat penting dalam melaksanakan gerakan *Zero* sampah agar gerakan ini dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, tetapi dalam mencapai sebuah tujuan diperlukannya relasi diantara kedua belah pihak yang bersangkutan begitu juga yang terjadi di Kota Yogyakarta ini dalam mewujudkan gerakan *Zero* Sampah diperlukan relasi antara Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat agar tujuan yang

diinginkan dapat tercapai. Tetapi seperti yang kita ketahui bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami tentang *Zero* sampah atau masyarakat yang malas tau tentang kebijakan *Zero* sampah. Dari jumlah depo di Kota Yogyakarta sebanyak 33 TPS/Depo apakah bisa menampung sampah yang sangat banyak di Kota Yogyakarta? Seperti yang kita lihat sekarang masih banyak masyarakat yang membuang sampah di lingkungan sekitar atau membuang sampah sembarangan, ini karena masyarakatnya tidak memahami gerakan *Zero* sampah atau mereka yang merasa dirugikan dari gerakan *Zero* sampah? Atau apakah hanya sekedar kebijakan saja yang dibuat oleh pemerintah tanpa melakukan pendekatan tanpa mengetahui kondisi dan bagaimana tanggapan dari masyarakat mengenai kebijakan yang dibuat? Dalam mewujudkan suatu tujuan diperlukan sebuah relasi antara kedua belah pihak agar sebuah tujuan dapat tercapai, lebih sangat penting agar mereka saling memahami akan kondisi di lingkungan sekitar dan tanggapan agar tujuan yang kita inginkan dapat terwujud dan sesuai apa yang diinginkan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah sekumpulan masalah yang dijabarkan sebagai topik penelitian atau topik pembahasan. Dengan penekanan penelitian ini, diharapkan penelitian diberikan fokus yang tepat sehingga informasi dapat dikumpulkan dan analisis data dapat dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian. Fokus penelitian ini antara lain:

- 1) Bagaimana Kondisi Eksistising Sistem Pengelolaan Sampah di Kota Yogyakarta
- 2) Bagaimana kemampuan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mendorong kepatuhan warga pada gerakan *zero* sampah

- 3) Bagaimana Pemerintah Kota Yogyakarta dalam membangun relasi dua arah kepada warga di wilayah Kota Yogyakarta
- 4) Apa saja tindakan ketidakpatuhan bagi masyarakat jika tidak patuh dalam melaksanakan gerakan zero sampah

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dirumuskan berdasarkan latar belakang di atas, yaitu, Bagaimana Relasi Kekuasaan Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat Dalam Melaksanakan Gerakan *Zero* sampah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Mengetahui dan Mendeskripsikan Relasi Pelaksanaan Konsep *Zero* sampah di Kota Yogyakarta.

2. Manfaat

a. Manfaat Akademis

Manfaat Akademis penelitian ini dapat memberikan wawasan pengetahuan kepada masyarakat maupun generasi-generasi yang akan datang tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mengelola sampah dengan baik.

b. Manfaat Bagi Penulis

Manfaat Bagi Penulis adalah sebagai sarana serta untuk memperluas pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh sehingga menambah wawasan dalam berfikir.

c. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan masukan untuk Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai aktor dalam kemandirian dan kesejahteraan bersama, supaya masyarakat terlibat dalam gerakan *Zero* sampah

E. Literatur Review

Literature review adalah sebuah metode yang sistematis, eksplisit dan reproduisibel untuk melakukan identifikasi, evaluasi dan sintesis terhadap karya-karya hasil penelitian dan hasil pemikiran yang sudah dihasilkan oleh para peneliti dan praktis. Untuk mendapatkan informasi terbaru tentang hasil penelitian ini, peneliti harus memberikan beberapa hasil dari penelitian sebelumnya atau penelitian yang terkait dengan penelitian ini. Beberapa penelitian yang ditulis dalam jurnal diantaranya sebagai berikut:

- 1) Fatia, D., & Sugandi, Y. S. (2019). *Gerakan Tanpa Sedotan: Hindari Kerusakan Lingkungan*. Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, 3(2), 66-75. Kerusakan lingkungan yang diakibatkan gaya konsumtif masyarakat modern membuat kerugian tidak hanya pada kehidupan masyarakat itu sendiri melainkan juga seluruh makhluk hidup. Gerakan sosial dilakukan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan keberdayaan masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. Gerakan ini dibuktikan dengan berkurangnya penggunaan sedotan plastik secara signifikan dikalangan masyarakat. keberhasilan ini juga dipengaruhi oleh beberapa restaurant makanan yang tidak lagi menyediakan sedotan plastik bagi masyarakat. Seperti virus yang terus menyebar, gerakan anti sedotan plastik ini terus meluas dan membuat kesadaran bagi hampir setiap kalangan masyarakat.

<https://pdfs.semanticscholar.org/ceab/68196e59f4ec9fcc9d7dd63d946188b244a3.pdf>.

- 2) Wenny W. Safitri (2022:1-5) *Hubungan Kekuasaan Dengan Budaya Politik Di Kepulauan Riau*. Journal of Comprehensive Science. Kriteria penguasa sebagai motor kekuasaan dari budaya melayu mengacu pada agama Islam,

antara lain hendaknya laki-laki, memiliki pembicaraan dan pendengaran baik adil, dan sebagainya. Dalam penerapannya pada sistem pemerintahan Kepulauan Riau saat ini, relasi kekuasaan terhadap budaya melayu adalah dengan mengikutsertakan semua komponen dalam pemerintahan, demi lancarnya kegiatan pembangunan masyarakat daerah.

<https://jcs.greenpublisher.id/index.php/jcs/article/view/6>.

- 3) WWA. Therik (2014:1-18). *Relasi Negara dan Masyarakat di Rote*. Doktor Studi Pembangunan Program Pascasarjana UKSW Topik menarik lainnya tentang Rote yang perlu diungkap terkait dengan perkembangan Civil society antara lain adalah Penetrasi Negara di mana negara (pada aras lokal bisa perangkat pemerintahan RT/RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten maupun institusi seperti TNI dan Polri) yang jauh lebih mandiri dan cenderung ekspansionis atau penetratif terhadap masyarakat. Serta topik-topik lainnya yang dianggap relevan terkait dengan perkembangan Civil society di Rote.
- <https://repository.uksw.edu//handle/123456789/9265>.

- 4) Febriano, Indra Gumay, et al. "*Aktor dan Relasi Kekuasaan dalam Pengelolaan Mangrove*." *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 12.2 (2015): 125-142. Politisasi lingkungan telah mengakibatkan terjadinya degradasi lingkungan dan marjinalisasi masyarakat lokal. kebijakan pemerintah kabupaten tidak berjalan dengan baik dan efektif, ketika mekanisme akses struktural dan relasional yang dijalankan pengusaha mampu mengkonversi mangrove menjadi tambak udang intensif. Aktor negara lainnya, yaitu TNI AL ternyata mampu menjaga keberadaan mangrove di wilayahnya dari intervensi aktor-aktor lainnya. <https://www.neliti.com/publications/95973/aktor-dan-relasi-kekuasaan-dalam-pengelolaan-mangrove>.

- 5) R. Susani (2022:1-14) *Relasi Kekuasaan antar Pemerintah, Masyarakat & LSM pada Revitalisasi Teluk Jakarta*. Jurnal ijd-demos. Relasi kekuasaan yang terbentuk dalam revitalisasi Teluk Jakarta membagi relasi kekuasaan menjadi tiga bagian yang saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu: a) Place atau arena kekuasaan berada pada tingkat lokal; b) Power yang dimiliki masing-masing stakeholder berbeda, bekerjanya visible power antar pemerintah dengan masyarakat maupun NGO dan relasi antar masyarakat dan NGO dalam proses perencanaan hingga implementasinya, kemudian bekerja hidden power yang dimiliki pemerintah terhadap masyarakat sehingga terbentuk suatu agenda oleh pemerintah terhadap kebijakan yang diterapkan di Teluk Jakarta c) Place atau ruang dalam kekuasaan yang terbentuk dalam proses perencanaan hingga implementasi yang tercipta yaitu invited space yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat dan NGO dalam proses perencanaan revitalisasi Teluk Jakarta. <http://www.hk-publishing.id/ijd-demos/article/view/219>.
- 6) Fitriani, N., & Eriyanti, F. (2020). *Relasi pengetahuan dan kekuasaan dukun dalam pengobatan tradisional pada masyarakat dusun lubuk tenam kecamatan jujuhan ilir kabupaten bungo provinsi jambi*. Jurnal Riset Tindakan Indonesia, 5(1), 27-35. Memiliki pengetahuan tentang pengobatan tradisional dukun memiliki kekuasaan dalam pengobatan di bandingkan dengan pengobatan medis. dan tidak adanya persaingan antara dukun dan bidan desa maupun antar sesama dukun. Dukun memiliki pengetahuan tentang pengobatan dan masyarakat membutuhkan pengobatan dari dukun maka antara dukun dan pasien saling keterkaitan satu sama lain. Pengetahuan yang dimiliki dukun membuat ia berkuasa disegi pengobatan sehingga ia memiliki peran dan

kedudukan dalam masyarakat. Namun kehidupan atau kegiatan dukun tidak hanya melakukan pengobatan saja akan tetapi dukun ini juga memiliki kegiatan lain seperti ke lading, berkebun dan lainnya.

<https://pdfs.semanticscholar.org/80d2/7bc2a6fc0418177310c8f9be42dc9014754c.pdf>.

- 7) AA. Pratama (2022:1-4) *Sistem peran serta Pemerintah bersama masyarakat dalam penanganan dan pengelolaan sampah di Kabupaten Tulang Bawang Barat*. Jurnal sosial dan humanis sains. Posisi pemerintah lingkungan dalam memberdayakan organisasi jaringan pengendalian sampah di Kabupaten Tulang Bawang Barat dari segi akademis, Peran pemerintah menjadi fasilitator pada pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan & pemrosesan akhir sampah Tanggapan mengenai kiprah pemerintah pada mengelola sampah dalam pada dasarnya telah baik, terkadang terdapat acara yang belum berjalan menggunakan baik Peran pemerintah sebagai dinamisor dalam pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah Tanggapan informan tentang kelompok masyarakat pengelola sampah sudah berjalan dengan baik.

<https://jurnal.saburai.id/index.php/jshs/article/view/1552>.

- 8) Suci Rezeki, R. Slamet Santoso (2021:425-435) *Analisis relasi/hubungan organisasi non Pemerintah dalam advokasi kebijakan lingkungan hidup kota Pekalongan*. Journal of Public Policy and Management Review. Pekalongan merupakan wilayah yang banyak terdapat sungai ditengah kota. Sebagai salah satu kota, maka Kota Pekalongan masih menghadapi masalah berupa pencemaran limbah dan sampah. Dimana Pekalongan merupakan kota batik dan industri batik adalah penyokong utama perekonomian masyarakat.

Diketahui bahwa adanya upaya pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut belum mampu mengatasi masalah secara maksimal. Relasi/hubungan yang melibatkan KPK dalam aktivitas Pemerintah: relasi/hubungan antara KPK dengan Pemerintah (Kota, Kabupaten, Provinsi dan Pusat) merupakan relasi yang saling memperbaiki dan mengembangkan iklim kebijakan yang kondusif seperti melibatkan Komunitas Peduli Kali Loji (KPKL) dalam aktivitas pemerintah. Misalnya dalam kegiatan FGD, konsultasi publik, undangan diskusi dan lain sebagainya.

<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/31468>.

- 9) M. Muharuddin (2019:1-16) *Peran Dan Fungsi Pemerintah Dalam Penanggulangan Kerusakan Lingkungan*. Jurnal hukum lingkungan. Provinsi Papua Barat khususnya Kota Sorong merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki potensi pesisir dan laut yang sangat besar. Wilayah pesisir memiliki banyak potensi pesisir dan laut yang dapat dimanfaatkan. Keanekaragaman terumbu karang, mangrove serta flora dan fauna laut merupakan potensi nilai ekonomi yang menjanjikan baik dalam produksi maupun pariwisata. Saat ini, kelestarian ekosistem pesisir terancam terutama oleh aktivitas manusia. Sumber daya pesisir merupakan anugerah alam yang sangat berharga bagi makhluk hidup yang harus dikelola dan dikembangkan dengan baik untuk kepentingan masa kini dan masa mendatang. Untuk melestarikan potensi sumberdaya pesisir Kota Sorong, diperlukan pengelolaan terpadu dan berkelanjutan untuk melestarikan sumberdaya yang ada.
- <https://doi.org/10.33506/js.v5i2.544>.

- 10) Mella. F. Rahayu, Anton F. Susanto (2021:483-493). *Paradigma Relasi Manusia dan Lingkungan Hidup Berbasis Kearifan Lokal Di Masa Pandemi*

Covid-19. Jurnal bina hukum lingkungan. Munculnya pandemi Covid-19 tidak terlepas dari masalah kerusakan lingkungan. Tampaknya ada masalah paradigmatis dalam hubungan antara manusia dan lingkungannya. Manusia mampu menjaga keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam lingkungannya. Namun, keinginan manusia tampaknya selalu mengarahkan orang untuk mengeksploitasi lingkungannya, dan mereka melakukannya tanpa perspektif lingkungan dan berkelanjutan. Pandemi Covid-19 baru-baru ini mungkin melambungkan keserakahan manusia terhadap lingkungan. Rusaknya ekosistem hutan dan habitat satwa menjadi penyebab satwa berpindah ke tempat yang tidak alami, termasuk virus Covid-19. <http://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/js/article/view/544>.

Berdasarkan hasil penelitian para peneliti terdahulu ditemukan sebuah persamaan dan perbedaan dari penelitian ini. Persamaan dari peneliti terdahulu dengan penelitian ini adalah dimana Relasi kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat dalam menanggapi persoalan atau permasalahan. Tetapi perbedaan peneliti terdahulu dengan peneliti ini terlihat dari beberapa hal dari segi metode penelitian, yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dan tipe penelitian etnografi. Metode pendekatan yuridis sosiologis digunakan dalam penelitian ini dengan penggunaan data primer, Tujuan penelitian : menguraikan dan menjelaskan aktor dan relasi kekuasaan, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis relasi kekuasaan antar pemerintah, masyarakat dan Lembaga Swadaya.

F. Kerangka Konseptual

1. Relasi Kekuasaan
 - a. Pengertian Relasi Kekuasaan

Power berasal dari kata “*power*” yang berarti daya atau kemampuan untuk melakukan sesuatu. Otoritas untuk sesuatu atau untuk melakukan sesuatu. Maka kekuasaan berarti kekuasaan yang mengatur atau mengendalikan kemampuan dan kekuatan. Relasi kekuasaan adalah relasi yang timbul antara aktor-aktor tertentu yang berkepentingan pada tingkat kekuasaan yang berbeda.

Max Weber dalam bukunya: *Wirtschaft und Gesellschaft* (1992) kemampuan, dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemampuan sendiri sekalipun mengalami perlawanan, dan apapun dasar perlawanan ini. (T. Setiawani, 2023:4).

Dari pendapat Max Weber di atas menyatakan kekuasaan sebagai peluang bagi seseorang maupun kelompok untuk memberikan kesadaran terhadap masyarakat akan kemauannya sendiri sekaligus mampu diterapkan terhadap tindakan perlawanan dari orang maupun golongan tertentu.

S. Talcott Parson sebagaimana dikutip dalam buku Dasar Dasar Ilmu Politik mengemukakan bahwa: Kekuasaan adalah kemampuan untuk menjamin terlaksanannya kewajiban kewajiban yang mengikat, oleh kesatuan kesatuan dalam suatu sistem organisasi kolektif. Kewajiban adalah sah jika menyangkut tujuan tujuan kolektif. Jika ada perlawanan, maka ada pemaksaan melalui sanksi sanksi negatif dianggap wajar, terlepas dari siapa yang melaksanakan pemaksaan itu. (R. Malau 2021:17).

Dari pendapat diatas menyimpulkan kekuasaan memandang dari sisi positif dari kekuasaan yaitu kemampuan agar pelaksanaan tugas wajib unit-unit dalam sistem organisasi dalam kaitannya dengan kewenangan, dimungkinkan rencana bersama dapat dilaksanakan dengan baik.

Dari pendapat para ahli diatas kekuasaan adalah kemampuan dari seseorang yang mempunyai kewenangan untuk menguasai orang lain dan mengendalikan mereka untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya.

b. Kekuasaan Dalam Wewenang

Kewenangan adalah kekuasaan formal atau terlegitimasi. Kewenangan pada dasarnya merupakan bentuk lain dari kekuasaan yang sering kali dipergunakan dalam sebuah organisasi. Dalam sebuah organisasi ,seseorang yang ditunjuk untuk dipilih memimpin suatu organisasi, bagian atau departemen memiliki kewenangan atau kekuasaan yang terlegitimasi. Seseorang yang ditunjuk untuk menjadi manajer personalia dengan sendirinya terlegitimasi untuk memiliki kewenangan dalam mengatur hal-hal yang terkait dengan sumber daya manusia atau orang orang yang terdapat didalam organisasi.

Kewenangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan selaras dengan kata wewenang, yakni kekuasaan dan juga hak dalam mengerjakan sesuatu (Peter S & Yeni S, 2009: 68). Kewenangan menurut Miriam Budiardjo ialah kekuasaan yang berbadan hukum, kecakapan dalam melaksanakan tindakan hukum, yang mana tindakan ini dilaksanakan dengan maksud menimbulkan akibat hukum, dan meliputi hal-hal yang lenyap dan timbulnya akibat hukum tertentu. Hak yang bermakna kebebasan dalam melaksanakan atau tidak melaksanakan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melaksanakan tindakan tertentu (Miriam Budiardjo, 2013: 63)

Dari pengertian diatas wewenang adalah hak dalam mengerjakan sesuatu yang berbadan hukum, dalam melaksanakan tindakan ini harus dilaksanakan dengan maksud menimbulkan akibat hukum tertentu.

c. Sumber Kekuasaan

1) Kekuasaan berdasarkan pada kedudukan

- a. Kekuasaan formal atau legal, kekuasaan dalam hal ini diperoleh karena dipilih atau ditunjuk dan diperkuat dalam aturan maupun perundang-undangan secara sah.
- b. Kendali atas Sumber dan Ganjaran, seseorang memiliki kekuasaan untuk memimpin dan memberikan ganjaran kepada anggota yang berada di bawahnya.
- c. Kendali atas hukum dan ganjaran, umumnya berkaitan dengan hukuman maka ganjarannya akan terkait dengan kendali atas hukuman. Biasanya kepemimpinan seperti ini berdasarkan rasa takut.
- d. Kendali atas informasi, dalam hal ini pihak yang memegang sumber informasi dapat menjadi pemimpin
- e. Kekuasaan kepribadian, hal ini didasarkan pada kepribadian seseorang atau sifatnya yang mempunyai keterampilan atau keahlian, maupun kharismanya.

2) Kekuasaan pada sumber politik

- a. Kendali terhadap proses pembuatan keputusan, kekuasaan seseorang untuk membuat sebuah keputusan misalnya dalam sebuah organisasi ketua atau pimpinan mempunyai kuasa untuk menentukan sebuah keputusan akan dibuat dan dilaksanakan.
- b. Koalisi kepemimpinan atas dasar kekuasaan politik ditentukan juga akan hak dan wewenang dalam membuat kerjasama dengan pihak lain.

- c. Partisipasi pimpinan dalam mengatur partisipasi anggotanya, artinya pemimpin mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan bentuk partisipasi dan siapa saja yang boleh terlibat.

2. Pemerintah

A. Pengertian Pemerintah

Menurut Suhady dalam Riawan (2009: 197) Pemerintah (*government*) ditinjau dari pengertiannya adalah *the authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation state, city, ect.* Dalam bahasa Indonesia sebagai pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara, kota dan sebagainya. Sedangkan pengertian Pemerintah dilihat dari sifatnya yaitu pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.

Dari pendapat para ahli diatas pengertian Pemerintah, yaitu pengaruh yang berwenang atas kegiatan masyarakat dalam sebuah Negara meliputi seluruh kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, yudikatif demi keamanan suatu Negara.

B. Fungsi Pemerintah

Menurut Rasyid (2000:13) fungsi pemerintah, yaitu :

1. Menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.

2. menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
3. Menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pekerjaan umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh non-pemerintahan, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah.

Dari pendapat para ahli di atas fungsi pemerintah, yaitu untuk menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan, memelihara ketertiban, melakukan pekerjaan umum, menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.

3. Masyarakat

A. Pengertian Masyarakat

Secara umum pengertian masyarakat adalah sekumpulan individu/individu atau orang yang hidup bersama, masyarakat disebut dengan "*society*" artinya adalah interaksi sosial, perubahan sosial, dan rasa kebersamaan, berasal dari kata lain "*socius*" yang berarti kawan. Manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan.

Menurut Mac Iver dan Page (Soerjono Soekanto 2006:22) masyarakat, yaitu suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antar berbagai kelompok, pengolongan, dan pengawasan tingkah laku, serta

kebiasaan-kebiasaan manusia. Sedangkan menurut Ralph Linton (2006:22) masyarakat, yaitu setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

Dari pendapat para ahli di atas masyarakat, yaitu suatu sistem atau tata cara, kerja kelompok atau sekelompok manusia yang telah hidup dan bekerja cukup lama serta kebiasaan manusia sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dengan batas-batas yang telah dirumuskan dengan jelas.

B. Sosialisasi Masyarakat

Sosialisasi diartikan sebagai sebuah proses seorang individu mempelajari kebiasaan-kebiasaan yang meliputi cara-cara hidup, nilai-nilai, dan norma-norma social yang terdapat dalam masyarakat agar dapat diterima oleh masyarakatnya.

Sosialisasi adalah proses sosial tempat seorang individu mendapatkan pembentukan sikap untuk berperilaku yang sesuai dengan perilaku orang-orang di sekitarnya (Soekanto, 2004: 78). Menurut David A. Goslin dalam Ihrom (2004: 30) berpendapat sosialisasi adalah proses belajar yang di alami seseorang untuk memperoleh pengetahuan ketrampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok Masyarakat.

Dari pendapat para ahli diatas sosialisasi, yaitu suatu proses sosial untuk belajar seseorang dalam pembentukan sikap dan memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan norma sesuai dengan perilaku seseorang dalam kelompok masyarakat.

4. Sampah

A. Pengertian Sampah

Sampah atau *Waste* (Inggris) memiliki banyak pengertian dalam batasan ilmu pengetahuan. Namun pada prinsipnya sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Bentuk sampah bisa berada dalam setiap fase materi, yaitu padat, cair, dan gas. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah menjelaskan definisi sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses yang berbentuk padat.

Chandra (2006, J. Dobiki:2-9)), yaitu sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Sedangkan menurut Nugroho (J. Susanto, 2022:3-11) sampah adalah barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik/pemakai sebelumnya, tetapi bagi sebagian orang masih bisa dipakai jika dikelola dengan prosedur yang benar.

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian sampah yaitu Sesuatu atau bahan yang sudah tidak layak dipakai lagi oleh pemiliknya/pemakai sebelumnya yang dibuang tetapi bagi sebagian orang masih bisa dipakai jika dikelola dengan prosedur yang benar.

B. Dampak dari Sampah

1. Dampak Positif

- a. Sampah dapat dipergunakan untuk menimbun tanah seperti rawa-rawa dan dataran rendah.

- b. Sampah dapat dimanfaatkan untuk pupuk.
- c. Dapat diberikan makanan ternak melalui proses pengelolaan.
- d. Berkurangnya tempat berkembang biak serangga atau binatang pengerat.
- e. Menurunnya insiden penyakit menular yang erat hubungannya dengan sampah.

2. Dampak Negatif

a. Terhadap Kesehatan

- 1. Pengelolaan sampah yang kurang baik akan menjadi tempat berkembang biak bagi vektor penyakit seperti lalat atau tikus sehingga insiden penyakit tertentu akan meningkat.
- 2. Insiden penyakit demam berdarah akan meningkat sebab vektor penyakit hidup dan berkembang biak dalam kaleng-kaleng atau bank bekas yang berisi air hujan.
- 3. Gangguan psikosomatis seperti sesak nafas, insomnia, stress dan lainnya.

b. Terhadap Lingkungan

- 1. Estetika lingkungan menjadi tidak sedap dipandang mata.
- 2. Proses pembusukan sampah oleh mikroorganisme akan menghasilkan gas-gas tertentu yang menimbulkan bau busuk.
- 3. Pembakaran sampah dapat menimbulkan pencemaran udara dan bahaya kebakarng yang lebih luas.

3. Dampak Ekonomi

Suatu usaha pemanfaatan sampah bagi masyarakat dikatakan berhasil bila produk yang dihasilkannya dapat berguna bagi masyarakat dan bernilai

ekonomis sehingga laku terjual. Demikian pula dengan bermacam-macam produk hasil pengolahan sampah, akan terasa manfaatnya bila dapat dirasakan oleh masyarakat banyak serta memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat yang mata pencariannya banyak menggantungkan diri dengan mengais sampah di TPA-TPA yang ada. Macam- macam hal yang dapat dihasilkan oleh pengelolaan sampah antara lain : Sampah menjadi kompos, sampah menjadi listrik, sampah menjadi bahan daur ulang, dan lain-lain. (Mm. Latuconsina. 2017: 1-18).

C. Jenis-jenis Sampah

Menurut Nugroho (2013:2-8), jenis-jenis sampah dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu :

1. Sampah Organik

Sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terdapat di alam, seperti tumbuhan dan hewan serta berbagai macam olahannya. Sampah yang tergolong organik dapat diolah kembali menjadi pupuk kompos dan berbagai macam pakan ternak .

2. Sampah Anorganik

Sampah atau limbah yang dihasilkan dari berbagai macam proses, dimana jenis sampah ini tidak dapat diurai oleh bakteri secara alami dan membutuhkan waktu yang lama dalam proses penguraiannya, contohnya berbagai sampah plastik, kaca, kaleng, besi, dll.

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa jenis sampah itu ada dua, yaitu, sampah organik dan sampah organik. Sampah organik sampah yang berasal dari sisa kegiatan atau aktivitas makhluk hidup dan dapat diolah

kembali. Sampah anorganik sampah atau limbah yang dihasilkan dari berbagai macam proses dimana jenis sampah ini tidak dapat diurai dan membutuhkan waktu yang lama dalam proses pengurangannya.

D. Sumber Sampah

Menurut Notoatmodjo (2007:6-27), sumber-sumber sampah yang menghasilkan sampah, yaitu:

1. Sampah yang berasal dari pemukiman

Sampah ini terdiri dari bahan-bahan padat sebagai hasil kegiatan rumah tangga yang sudah dipakai dan dibuang, seperti: sisa-sisa makanan baik yang sudah dimasak atau belum, bekas pembungkus berupa kertas, plastik, dan daun sebagainya.

2. Sampah yang berasal dari tempat-tempat umum

Seperti pasar, sekolah, tempat hiburan, terminal bus, stasiun kereta api, dan sebagainya. Sampah ini berupa kertas, plastik, dan botol.

3. Sampah yang berasal dari perkantoran

Baik perkantoran pendidikan, perdagangan, departemen, perusahaan dan sebagainya. Sampah ini berupa kertas-kertas, plastik. Sampah ini bersifat kering dan mudah terbakar.

Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan sumber sampah bisa berasal dari lingkungan sekitar kita dihasilkan dari aktivitas manusia setiap hari dimana bisa menghasilkan sampah. sampahnya juga ada bermacam-macam yang menghasilkan sampah peternakan/pertanian, perkantoran, industri pertanian dan sebagainya. Sumber sampah yang ada disekitar kita ada begitu banyak mulai dari sampah rumah tangga, sampah medis, sampah pasar sampah industri, sampah pertanian dan peternakan, dimana sumber sampah ini

dibilang berdasarkan hasil aktivitas manusia dan semakin banyaknya jumlah penduduk dan perkembangan teknologi yang semakin maju tidak heran jika sampah dan sumber-sampah juga semakin banyak dan menumpuk.

5. Zero Sampah

A. Pengertian *Zero* sampah

Zero sampah adalah gaya hidup modern mendorong manusia untuk terus menerus membutuhkan banyak barang. Tentunya kita sadar jika membeli barang sama saja menghasilkan sampah, apalagi barang sekali pakai. Aktivitas manusia semakin beragam setiap harinya dan semakin banyak juga barang dan produk yang dibeli, sehingga sampah yang dihasilkan sudah melebihi dari kemampuan alam untuk menyerapnya. Pengertian lain dari *Zero* sampah adalah suatu prinsip nol sampah atau *Zero* sampah merupakan konsep pengelolaan sampah didasarkan pada kegiatan daur ulang. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pemilahan, pengomposan dan pengumpulan barang layak jual (Ika 2000:4-13). Menurut Bebasari dalam Yuniarti (2004:225-231), merupakan konsep pengelolaan sampah secara terpadu yang meliputi proses pengurangan timbulnya volume sampah. Maharani, dkk (2007:101-113), penggunaan kembali, minimalisasi, dan daur ulang sampah adalah hal yang sangat diperlukan untuk mengurangi timbulan sampah yang membebani TPA dan Lingkungan. *Zero* sampah pada dasarnya bukanlah pengelolaan hingga tidak ada lagi sampah yang dihasilkan karena tidak ada aktivitas manusia yang tidak menghasilkan sampah. Namun, pada konsep ini menekankan pada upaya pengurangan hingga nol jumlah sampah yang masuk ke TPA. Dari Pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa *Zero* sampah merupakan kegiatan pengelolaan sampah yang didaur ulang. Pengelolaan itu sendiri dilakukan

dengan pemilahan, pengomposan dan penggunaan barang layak jual untuk mengurangi timbulan sampah yang membebani TPA dan mengurangi angka timbulnya penumpukan sampah.

B. Konsep *Zero* sampah 5R

Selama ini mungkin kita sering mendengar 3R dalam pengelolaan sampah, yaitu *Reduce, Reuse, Recycle* dimana dengan adanya konsep 3R ini dapat literatur mengurangi jumlah sampah yang ada. Namun untuk sekarang ini konsep yang sering dipakai adalah konsep 5R.

Menurut Safitri 2014 (Br. Barus, 2021:1-52) konsep 5R itu adalah :

1. *Reduce* (Mengurangi), yaitu misalnya dengan cara membawa kantong plastik sendiri dari rumah ketika akan berbelanja sehingga ketika pulang tidak menambah volume sampah.
2. *Reuse* (Menggunakan atau Memakai Kembali), yaitu memanfaatkan barang-barang yang sudah tidak layak dipakai atau tidak berguna.
3. *Recycle* (Mendaur Ulang), misalnya mengelola sampah menjadi sampah organik atau kompos.
4. *Replant* (Menanam Kembali), memanfaatkan sisa bahan pangan atau barang yang dapat digunakan kembali dan memiliki fungsi yang sama
5. *Replace* (Menganti), mengganti barang yang berpotensi menjadi sampah terutama sampah anorganik dengan barang lain.

Dari pendapat para ahli di atas dalam menerapkan konsep *zero* sampah terkait pengelolaan sampah itu terdapat lima konsep yang dimana dari kelima konsep itu memiliki pengertian dan fungsinya masing-masing dalam mengurangi jumlah sampah dan mendaur ulang sampah.

C. Tujuan konsep *Zero* sampah

Menurut Susanto (2016:2-9), tujuan dari konsep *zero* sampah, yaitu :

- 1) Mengurangi jumlah timbunan sampah
- 2) Mengurangi perubahan iklim
- 3) Mengurangi konsumsi sumber daya untuk menghemat energy
- 4) Mencegah pembentukan pencemaran udara
- 5) Meminimalkan kerusakan ekosistem

Sampah merupakan permasalahan utama dalam pencemaran lingkungan baik sampah organik maupun sampah anorganik. Sehingga dibutuhkan suatu konsep khusus dalam penanganan sampah pada suatu lingkungan.

D. Perkembangan zero sampah

Kota-kota di seluruh dunia menghasilkan sekitar 1,3 miliar ton sampah setiap tahun dan volume ini diperkirakan akan meningkat menjadi 2,2 miliar pada tahun 2025. Palmer (2004:4-10) merupakan orang pertama yang menggunakan istilah *Zero* sampah di tahun 1973 sebagai istilah untuk memulihkan sumber daya dari limbah kimia. Sejumlah kota di dunia tahun 1995 menerapkan undang-undang *No Waste* untuk mencapai target tahun 2010 dan Canberra menjadi kota pertama di dunia yang sukses menjalankan mencapai target *Zero* sampah (Connect, 2013; Snow et al, 2003). Departemen Lingkungan Hidup San Francisco mendefinisikan *Zero Waste* sebagai “ Tidak mengirim apapun ke Landfill dan Incinerator serta membuat kebijakan yang mengurangi sampah dan meningkatkan akses daur ulang dan kompos “ (SF Environment, 2011:4-10).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Yang menggambarkan suatu hasil penelitian. Menurut Mukhtar (2013:10) sebuah metode penelitian yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang seluas-luasnya terhadap subjek penelitian pada suatu saat tertentu. Metode penelitian deskriptif ini digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan dan menggambarkan data secara alamiah.

2. Unit Analisis

Menurut Hamidi (2005:75-76) menjelaskan bahwa unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian. Dengan penjelasan diatas, maka penulis meletakkan unit analisis pada obyek dan subyek penelitian. Obyek dan subyek dalam penelitian ini adalah :

a. Obyek : Relasi Pemerintah Kota Yogyakarta dan Masyarakat Dalam Melaksanakan Konsep Zero sampah (Nol Sampah)

b. Subyek :

Subyek unit analisis dalam penelitian ini, yaitu purposive teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan.

Table 1.1 daftar nama informan

No	Nama	Jabatan	Pendidikan	Umur
1	Pak Ahmad Haryoko	Kepala Pengelolaan Sampah	S-2	53 Tahun
2	Ibu Mareta Savena	Kepala Penanganan Persampahan	S-2	33 Tahun
3	Ibu Wulandari	Staf Bagian Pengelolaan	S-1	28 Tahun
4	Ibu Nurul	Staf Bagian Pengelolaan	S-1	24 Tahun
5	Pak Bejoriyanto	Bagian Pengelolaan sampah	SMK	58 Tahun

6	Pak Anus Sopiang	Ketua RT 72	SMA	45 Tahun
7	Ibu Reni	Ibu RT 73	SMA	33 Tahun
8	Pak Lilik	Ketua RT 30	SMK	63 Tahun
9	Pak Edi Purwanto	Masyarakat Biasa	SMA	58 Tahun
10	Pak Sudarmanto	Ketua RW 18	SMA	48 Tahun
11	Pak Suroto	Masyarakat Biasa	SMK	53 Tahun
12	Pak Ekawahyu	Ketua RT 29	SMK	39 Tahun
13	Pak Purwanto	Masyarakat Biasa	SMA	55 Tahun
14	Pak Juni Purwanto	Masyarakat Biasa	SMA	50 Tahun
15	Pa Rian	Masyarakat Biasa	SMK	30 Tahun

3. Teknik Pengumpulan Data

A. Observasi

Menurut Bungin (2007:115-117), observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam pengumpulan data. Hasil observasi berupa hasil aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu dan observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Dari pengertian di atas langkah dalam observasi terjun langsung ke lokasi penelitian dan mengamati aktivitas atau kegiatan di TPS/Depo di Kota Yogyakarta dan ke bank sampah, mengamati masyarakat dalam mengelola sampah dan mengamati kinerja kerja petugas jaga TPS/Depo.

B. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu dari beberapa teknik dalam mengumpulkan informasi dan data . Proses wawancara terkadang masih banyak yang tidak memahami karena wawancara dianggap sebagai bentuk dari percakapan yang

sedang dilakukan dalam keseharian. Menurut Yunus (2010:385) menyebutkan bahwa wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian.

Bertanya langsung kepada informan atau narasumber dan langsung terjun lapangan bertanya mengenai gerakan zero sampah di lingkungan masyarakat Kota Yogyakarta, DLH, bagian pengelola dan petugas depo.

C. Dokumentasi

Salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mengumpulkan data menganalisis dokumen yang berbentuk gambar, tulisan peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan judul penelitian penulis. Dokumentasi berupa gambar, tempat sampah, dokumen data petugas jaga depo dan jumlah depo di Kota Yogyakarta.

4. Teknik Analisis Data

Noeng Muhadjir (1998: 104) mengemukakan pengertian analisis data sebagai “upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Miles dan Huberman (1992:90) menggambarkan analisis data kualitatif sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang diperoleh dilapangan. Teknik ini digunakan agar data dapat digunakan seefisien

mungkin atau membuang data yang tidak diperlukan dan mengorganisasikan data sehingga kesimpulan final dapat diambil dan diversifikasi.

b. Penyajian Data

Pada bagian ini, peneliti menyajikan data-data yang telah dipilih dan dikelompokkan secara sistematis dalam bentuk uraian sebagai sebuah laporan. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam mengkonstruksikan, menginterpretasikan, dan menyimpulkan data yang telah dipilih tersebut.

c. Penarikan Kesimpulan

Data yang diperoleh dan disusun dalam bentuk uraian tersebut, selanjutnya dibuat kesimpulan. Kesimpulan tersebut diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan display data, sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.

BAB II

PROFIL KOTA YOGYAKARTA

A. Gambaran Umum Kota Yogyakarta

1. Sejarah Kota Yogyakarta

Berdirinya Kota Yogyakarta berawal dari adanya Perjanjian Gianti pada Tanggal 13 Februari 1755 yang ditandatangani Kompeni Belanda di bawah tanda tangan Gubernur Nicholas Hartingh atas nama Gubernur Jendral Jacob Mossel. Isi Perjanjian Gianti: Negara Mataram dibagi dua: Setengah masih menjadi Hak Kerajaan Surakarta, setengah lagi menjadi Hak Pangeran Mangkubumi. Dalam perjanjian itu pula Pengeran Mangkubumi diakui menjadi Raja atas setengah daerah Pedalaman Kerajaan Jawa dengan Gelar Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Alega Abdul Rachman Sayidin Panatagama Khalifatullah.

Meskipun Kota Yogyakarta baik yang menjadi bagian dari Kesultanan maupun yang menjadi bagian dari Pakualaman telah dapat membentuk suatu DPR Kota dan Dewan Pemerintahan Kota yang dipimpin oleh kedua Bupati Kota Kasultanan dan Pakualaman, tetapi Kota Yogyakarta belum menjadi Kota Praja atau Kota Otonom, sebab kekuasaan otonomi yang meliputi berbagai bidang pemerintahan masih tetap berada ditangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota Yogyakarta yang meliputi daerah Kasultanan dan Pakualaman baru menjadi Kota Praja atau Kota Otonomi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1947, dalam pasal I menyatakan bahwa Kabupaten Kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Kasultanan dan Pakualaman serta beberapa daerah dari Kabupaten Bantul yang sekarang menjadi Kecamatan Kotagede dan Umbulharjo ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah tersebut dinamakan Haminte Kota Yogyakarta.

Seiring dengan bergulirnya era reformasi, tuntutan untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerah secara otonom semakin mengemuka, maka keluarlah Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur kewenangan Daerah menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab. Sesuai UU ini maka sebutan untuk Kotamadya Dati II Yogyakarta diubah menjadi Kota Yogyakarta sedangkan bentuk pemerintahannya disebut dengan Pemerintahan Kota Yogyakarta dengan Walikota Yogyakarta sebagai Kepala Daerahnya.

2. Visi dan Misi Kota Yogyakarta

A. Visi Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan.

B. Misi Kota Yogyakarta

- 1) Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan
- 2) Mempertahankan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan
- 3) Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang unggul dalam pelayanan jasa
- 4) Mewujudkan Kota Yogyakarta yang nyaman dan ramah lingkungan
- 5) Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang bermoral, beretika, beradab dan berbudaya
- 6) Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance (tata kelola pemerintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum
- 7) Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai

- 8) Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas
- 9) Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat

B. Sejarah Penataan Sampah dan Jumlah Depo dan Data Petugas Jaga di Kota Yogyakarta

1. Sejarah Penataan Sampah di Kota Yogyakarta

Forum Bank Sampah Kota Yogyakarta merupakan organisasi yang dibina oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, guna mewujudkan sinergitas pada Bank Sampah di Kota Yogyakarta, serta menjadi jejaring untuk berbagai informasi terkait pengelolaan dan pemanfaatan sampah organik maupun anorganik yang ramah lingkungan, dan berperan aktif membangun ekosistem persampahan yang berkelanjutan dalam mewujudkan Kota Yogyakarta menjadi kota yang senantiasa bersih dan nyaman.

Forum Bank Sampah Kota Yogyakarta terbentuk pada 24 Januari 2022, dengan landasan kekhawatiran yang timbul dimana semakin berkurangnya keaktifan Bank Sampah yang ada di Kota Yogyakarta. (Terdapat 565 Bank Sampah di Kota Yogyakarta, 20% Tidak Aktif). Dengan banyaknya keresahan mengenai sampah yang ada di Kota Yogyakarta, Bank Sampah kurang memiliki ruang untuk belajar, bertukar pendapat dalam peningkatan kinerja dan pemecahan masalah yang ada.

Melalui hal tersebut, Forum Bank Sampah Kota Yogyakarta hadir memberikan ruang bagi Bank Sampah di Kota Yogyakarta sebagai bentuk Komunikasi dan Pembinaan kepada seluruh Bank Sampah yang ada, sehingga kedepannya Bank Sampah dapat terus berjalan dengan baik, dan permasalahan sampah yang ada di Kota Yogyakarta dapat semakin berkurang.

Anggota Forum Bank Sampah sendiri terdiri dari perwakilan setiap kemantren dengan tujuan agar segala koordinasi dan penyampaian informasi dapat dilakukan lebih mudah, serta mampu menjangkau Kelurahan dan seluruh kegiatan yang ada dapat dilakukan dengan saling bersinergi. Sumber (<https://forumbs.jogjakota.go.id/page/index/sejarah.>)

2. Data Petugas dan Jumlah TPS/Depo di Kota Yogyakarta (Berupa Gambar)

Berdasarkan wawancara dengan Pak Bejoriyanto (Staf Pengelolaan) jumlah TPS/Depo di Kota Yogyakarta sebanyak 34 TPS/Depo yang tersebar di seluruh Kota Yogyakarta dengan jumlah daya tampung yang berbeda di setiap depo. Berikut daftar jumlah data petugas dan jumlah TPS/Depo di Kota Yogyakarta.

DAFTAR PETUGAS JAGA TPS/DEPO TUNGKAK					
No	Nama Depo/TPS	Petugas Jaga Utama	Petugas Jaga Tambahan Jam 08:00 - 11:00		Petugas Jaga Tambahan Siang
			Minggu I (1-7 Juli)	Minggu II (8-15 Juli)	Penyapuan : Jam 11:00 - 14:00 Pengangkutan : Jam 10.00-13.00
1	Depo Purawisata/THR	1. Agus Surajiman 2. Heru Dwi Hantara	Wahyudi Pardiana Yuni Eko Santoso	Buchori Nur Ahmad Hermawan Santoso Aiswadi	Taufik Nurmanto
2	Depo Sorosutan	1. Suhariyanto 2. Walijo	Wahyu Aditya N Yuliantoro Ahmad Nashruddien	M Annur Rokhim Suharwanto Yuni Eko Santoso	Rizal Ariffudin
3	TPS Sisingamangaraja	1. Saryono 2. Saloko 3. Agung Cahyono (PPLH)	Asih Sudarman Tri Wibowo Jumadi	Muh Agus Widodo Sigit Wibowo Agus Dwi Riyanto	Kawiyo, Suroto, Supriyono, Sariyanto
4	LC Pemukti	1. Agus Waluyo 2. Kamiran 3. Fajar (PPLH)	Aan Nur Santosa Marwoko Alan Tri Widakdo	Asih Sudarman Tri Wibowo Jumadi	Yunianto
DAFTAR PETUGAS JAGA TPS/DEPO GUNUNGKETUR					
No	Nama Depo/TPS	Petugas Jaga Utama	Petugas Jaga Tambahan Jam 08:00 - 11:00		Petugas Jaga Tambahan Siang
			Minggu I (1-7 Juli)	Minggu II (8-15 Juli)	Penyapuan : Jam 11:00 - 14:00 Pengangkutan : Jam 10.00-13.00
1	Depo Mandala Krida	1. Mayar 2. Cahyo Gemilang	Febryan Nurcahyono Wijaya Kusuma	Basuki M Dani Kurnia	Agung Udhan, Parjiyono, Fajar Purnomo, Suyatno
2	Depo Argolubang	1. Mujiyono 2. Muji Slamet	Sutarno Muhammad Yusuf	Ergian Chandra P Bendri	Kody, Arsetyo, Sigit, Minto, Wintala
3	TPS Lempuyangan	1. Paryanta 2. Boimin 1966	Bagas Febriantoro Eko Cahyono	Rico Yoga Pamungkas Sapto Aji Darmawan	Pargiyanto, Prabowo Agus
4	TPS Cantel	1. Marjana 2. Supoyo 3. Wahyu Saputra (PPLH)	Pebrianto Sobari	Mujiman Dwi Nur Cahya	Giyatno, Slamet Widodo
5	TPS Ki Mangunsarkoro	1. Samsuhadi 2. Ivan Sapari (PPLH) 3. Dian Haryanto (PPLH)	Rahmad Romadhoni Toni Eko Suwartono	Suwandiyanto Merridian	Gunarto, Widada Santosa
6	TPS Hayam Wuruk	1. Heru Suparno (Taman) 2. Ahmad Nur A (Taman) Siang Jam 11:00 - 19:00 3. Tri Wardoyo 4. Subowo 5. Poniman	Mujiyanta Nurdiyanto	Andri Wibowo Papik Dwisetyawan	Suparno, Susmiyanto, Nursahid, Agus Listyanto

DAFTAR PETUGAS JAGA TPS/DEPO KRASAK					
No	Nama Depo/TPS	Petugas Jaga Utama	Petugas Jaga Tambahan Jam 08:00 - 11:00		Petugas Jaga Tambahan Siang
			Minggu I (1-7 Juli)	Minggu II (8-15 Juli)	Penyapuan : Jam 11:00 - 14:00 Penggangkutan : Jam 10.00-13.00
1	Depo Pengok	1. Ismail 2. Bejo Riyanto	Sigit Andriyanto Rinanto Tri Cahyo Nugroho	Samsuri Ponijan Endang Kusmana	Rukijo, Ratmanto, Tri Budianto
2	Depo RRI	1. Tutut Prastowo 2. Karyadi	Fajar Yulianto Ary Jatmiko Reno Setiawan	Tri Muryadi Sugeng Purnomo Bayu Dwi Nugroho	Jualip Subardi, Davit R, Surya Eko P
3	TPS Langensari	1. Parjiyono 2. Edi Priyanto (Taman)	Misran Nugroho Dwi Prasetyo Haryono	Sopiyan Dwiswiswanto Nanang Ari Van Daru Ari Pamungkas	Poniran, Andi Erlana, Purbo,
4	Bin Jl. Solo	1. Rizal Satria Tama (Taman) 2. Adi Muh Taufiq (Taman)	Rahman Tri Hastomo Maisar	Widi Yudha Prawira Nur Cahyo Nugroho	Arif Kurniawan, Supandi Rudi Gancis, Septian, Baryudi
5	TPS Krasak Barat	1. Budi Sangara 2. Eko (RTHP)	Endro Sulisty Budi Prasetyo	Sukrisno Arfi Ardhana Fauzi	Yamidi, Iswanto, Eko Prasetyo
6	TP Sagan	1. Paidei 2. Slamet Supriyo (PPLH)	Nurgiyanto Parjiyo Imam Safi'i	Bejo Triyono Okta Kris Tunggoro Sigit Purnomo	Ngatijo, Kawit Suharman, Gito, Mujiyono Slamet

DAFTAR PETUGAS JAGA TPS/DEPO NGASEM GADING					
No	Nama Depo/TPS	Petugas Jaga Utama	Petugas Jaga Tambahan Jam 08:00 - 11:00		Petugas Jaga Tambahan Siang
			Minggu I (1-7 Juli)	Minggu II (8-15 Juli)	Penyapuan : Jam 11:00 - 14:00 Penggangkutan : Jam 10.00-13.00
1	Depo Ngasem	1. Redjo Utomo 2. Mursidi 3. Zainal Abidin	Nigko Septi Arde Paeno Al Hadiprayitno Suparno	Samsudi Sunarto Dwi Ariyanto	Trianto Triyanta
2	TPS PDHI	1. Kodrat 2. Rusyanto 3. Isnaini Nur F(PPLH)	Asep Dwi Nuryanto Dwi Paryanto	Irvan Kurniawan Jamal	TIDAK ADA
3	TPS Area Kraton	-	-	-	Aditya R, Eko Marwan, Imam Hanafi, Wiyoro
4	TPS Pasar Pujo	-	-	-	Eko Arry S, Iwan D, Kuncoro, Uut Budoyo
5	TPS Tamansari	1. Suwanta 2. Mustofa (RTHP)	Adityo Suharjo Ahmad Haryadi	Poniman Dicky Ardiansyah Oktora Rudi Rosarianto	TIDAK ADA
6	Depo Sariloyo / Dukuh	1. Rubiyanto 2. Suratjo	Fauzan Jodi Marlinton Hendri Okta Wijanarko Daru Setiawan	Toni Dwi Anggara Triyono Sri Cahyadi	TIDAK ADA
7	Depo Purawisata/THR	1. Agus Surajiman 2. Heru Dwi Hantara	Wahyudi Pardiana Yuni Eko Santoso	Buchori Nur Ahmad Hermawan Santoso Aiswadi	Taufik Nurmanto

DAFTAR PETUGAS JAGA TPS/DEPO MALIOBORO KRANGGAN					
No	Nama Depo/TPS	Petugas Jaga Utama	Petugas Jaga Tambahan Jam 08:00 - 11:00		Petugas Jaga Tambahan Siang
			Minggu I (1-7 Juli)	Minggu II (8-15 Juli)	Penyapuan : Jam 11:00 - 14:00 Penggangkutan : Jam 10.00-13.00
1	Depo Utoroloyo / Tompeyan	1. Suryana Buntara 2. Yudhi Kristianto	Alex Suprpto Anthonius Wahyu K Dalijo	Jamangat Slamet Mathewa Anas M	Suwali Sarijo Suratiman Tri Wahyono
2	LC Bener	1. Jumingat 2. Nandar Isnanto (PPLH)	Dedi Dwi Kurniawan	M Dwi Nugroho M Rifki Fauzi	TIDAK ADA
3	TPS RW 04 Bener / Kricak Kidul	1. Seneng 2. Dibson W (Taman)	Elang Sriwibowo Eli Maskur Nanang Krisbiyantoro	Oriza Sativa C Seto Dwi NP Mardiyono	TIDAK ADA
4	TPS Gondolayu	1. Trubus 2. Edi Sulistianto (PPLH)	Gunardi Iqbal Sholikhhan H	Kirdiman Partono	TIDAK ADA
5	Depo Pringgokusuman	1. Rohmadi 2. Wakino 3. Sahid (RTHP)	Andri Setiawan Routama Nanda S	Karyanto Muhaim	TIDAK ADA
6	Depo Serangan	1. Tarjana 2. Y. Sumardi 3. Isdiyono 4. Setyo Wikantono (PPLH)	Muhammad Fauzi Sihana Riyadi Saputra	Safarian Agustus M Kabiyantoro Nuryadi	Suryadi Ponidi Widiono
7	TPS Kleringan	1. Sumardiyono 2. Boimin 1975 3. Sujiran 4. Mardiyanto (PPLH)	Dwi Nuryanto Ismaryanto	Ngatiran Nur Priyaningsih	TIDAK ADA

Dari Jumlah TPS/Depo beserta tugas jaga di Kota Yogyakarta di setiap Kecamatan yang berjumlah 34 TPS/Depo di Kota Yogyakarta dengan daya tampung sampah di setiap depo berbeda. Dengan harapan dengan adanya Depo yang tersebar di setiap Kecamatan Kota Yogyakarta dapat mewujudkan gerakan kebijakan zero sampah. Tetapi apakah dengan adanya zero sampah di Kota Yogyakarta dengan daya tampung yang berbeda bisa menampung sekaligus dapat mewujudkan gerakan zero waste? Apakah setiap penjaga TPS/Depo bisa memaksimalkan jam kerja mereka di setiap Depo atau hanya asal bekerja. Jika jam kerja mereka dan kinerja kerja mereka sangat bagus tentunya gerakan zero sampah ini dapat berjalan dengan baik tetapi jika tidak percuma kebijakan ini dikeluarkan tetapi tidak dilaksanakan.

C. Kondisi Fisik Wilayah Kota Yogyakarta

1. Batas Administrasi

Secara administratif, Kota Yogyakarta terdiri dari 14 Kemantren dan 45 kelurahan dengan batas wilayah:

- a. Sebelah Utara: Kabupaten Sleman (Kapanewon Mlati dan Kapanewon Depok)
- b. Sebelah Timur: Kabupaten Bantul (Kabupaten Sleman, Kapanewon Depok, dan Kapanewon Banguntapan)
- c. Sebelah Selatan: Kabupaten Bantul (Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Sewon, dan Kapanewon Kasihan)
- d. Sebelah Barat: Kabupaten Bantul (Kabupaten Sleman, Kapanewon, dan Kapanewon Kasihan)

Table 2.1 Data Wilayah Adminitrasi Kota Yogyakarta Tahun 2021

No	Kemantren	Luas Wilayah (km)	Jumlah	
			Kelurahan	Penduduk
1	Tegalrejo	2,91	4	37.416
2	Jetis	1,72	3	27.350
3	Gondokusuman	3,97	5	43.096
4	Danurejan	1,10	3	21.357
5	Gedongtengen	0,96	2	19.884
6	Ngampilan	0,82	2	18.453
7	Wirobrajan	1,76	3	28.064
8	Mantijeron	2,61	3	35.608
9	Kraton	1,40	3	21.890
10	Gondomanan	1,12	2	14.975
11	Pakualaman	0,63	2	10.750
12	Mergangsan	2,31	3	31.971
13	Umbulharjo	8,12	7	70.818
14	Kotagede	3,07	3	34.632
Total		32,50	45	416,224

Sumber: Open Data Kependudukan Jogja Smart Service

Dari tabel diatas wilayah adminitrasi Kota Yogyakarta dengan wilayah terluas Umbulharjo 8,12 dan jumlah Kelurahan 7, jumlah penduduk 70.818. luas wilayah terkecil kemantren Pakualaman 0,63 dan jumlah Kelurahan 2 dengan jumlah penduduk 10.750.

2. Letak Geografis

Kota Yogyakarta terletak antara 110°24'19"-110°28'53" Bujur Timur (BT) dan 07°15'24"-07°49'26" Lintang Selatan (LS) dengan luas wilayah sekitar 32,5 km² atau 1,02" Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Jarak terjauh dari utara ke selatan sekitar 7,5 km dan dari barat ke timur sekitar 5,6 km. Sebagian wilayah, dengan luas seluas 1.657 hektar, terletak pada ketinggian kurang dari

100 meter, dan selebihnya (1.593 hektar) terletak pada ketinggian 100–199-meter dpl. Jenis tanah terbanyak adalah regosol. Dari utara ke selatan mengalir 4 sungai, yaitu: Sungai Gajahwong yang mengalir di bagian timur kota, Sungai Belik Manunggal, Sungai Kodo di bagian tengah dan Sungai Winongo di bagian barat kota.

D. Kondisi sosial ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat

1. Populasi

Pertumbuhan penduduk, migrasi dan ekonomi mempengaruhi timbulan sampah di Yogyakarta. Berikut adalah grafik pertumbuhan penduduk di Kota Yogyakarta selama lima tahun terakhir.

Tabel 2. 1 Pertumbuhan Penduduk Kota Yogyakarta periode 2016-2021.

No	Kemantren	Penduduk Tahun 2016	Penduduk Tahun 2021	Kepadatan Penduduk Tahun 2021	Pertambahan Penduduk
1	Tegalrejo	36,693	37,416	12,858	1,97
2	Jetis	27,326	27,350	15,901	0,09
3	Gondokusuman	42,067	43,096	10,855	2,45
4	Danurejan	21,226	21,357	19,415	0,62
5	Gedongtengen	20,552	19,844	20,671	-3,30
6	Ngampilan	18,710	18,453	22,504	-1,37
7	Wirobrajan	27,925	28,064	15,945	0,50
8	Mantijeron	35,324	35,608	13,643	0,80
9	Kraton	21,985	21,890	15,636	-0,43
10	Gondomanan	15,0898	14,975	13,371	-0,76
11	Pakualaman	10,738	10.750	17,063	0,11

12	Mergangsan	31,948	31.971	13,840	0,07
13	Umbulharjo	68,403	70.818	8,721	3,53
14	Kotagede	33,326	34.632	11,281	3,92

Sumber: Hasil Analisis dari Open Data Kependudukan dalam portal Jogja Smart Service.

Dari tabel diatas pertumbuhan penduduk Kota Yogyakarta dari tahun 2016-2021 itu masing-masing setiap Kemantren Kota Yogyakarta mengalami pertumbuhan yang sangat baik dalam 5 tahun terakhir. Umbulharjo dengan jumlah kepadatan penduduk Tahun 2016 dengan jumlah penduduk 68,403 mengalami peningkatan di Tahun 2021 dengan jumlah penduduk 70,818. Sedangkan Pakualaman bisa dibilang jumlah penduduk paling sedikit 10,738 dengan tambahan jumlah penduduk yang tidak begitu banyak 10,750.

Mereka yang memiliki tempat tinggal tetap dan bepergian ke luar daerah selama lebih dari enam bulan tidak dihitung di tempat tinggal, tetapi di tempat tujuan. Selama bertahun-tahun tidak dilakukan sensus penduduk, data penduduk diperoleh dari hasil ramalan penduduk. Proyeksi penduduk adalah perhitungan ilmiah berdasarkan asumsi tentang komponen perubahan penduduk, yaitu. kelahiran, kematian dan migrasi. Proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035 menggunakan data dasar penduduk dari SP2010.

Tabel 2.2 Pertumbuhan penduduk tahun 2020

No	Kemantren	Penduduk (Jiwa)		Pertumbuhan Penduduk (%) 2010-2020	
		2010	2020	200-1010	2010-2020
1	Mantrijeron	31,267	33,340	-0,41	0,62

2	Kraton	17,471	19,943	-1,24	0,26
3	Mergangsan	29,292	28,793	-0,69	-0,18
4	Umbulharjo	76,743	68,170	1,04	-1,14
5	Kotagede	31,152	33,280	1,12	0,64
6	Gondokusuman	45,293	36,921	-0,68	-1,96
7	Danurejan	18,343	18,670	-0,75	0,17
8	Pakualaman	9,316	9,148	-1,29	-0,18
9	Gondomanan	13,029	12,793	-0,63	-0,18
10	Ngampilan	16,320	15,358	-0,73	0-59
11	Wirobrajan	24,840	24,739	-0,73	-0,04
12	Gedongtengen	17,185	16,484	-0,39	-0,40
13	Jetis	23,454	23,385	-1,02	-0,03
14	Tegalrejo	34, 923	34,619	-0,06	-0,08
	TotalKota Yogyakarta	388.267	373.589		
	Rata-Rata Kota Yogyakarta			-0.21	-0,38

Sumber: Kota Yogyakarta Dalam Angka 2021 (BPS Kota Yogyakarta 2021)

Data sensus tahun 2020 menunjukkan penurunan jumlah penduduk karena sensus yang dilakukan pada tahun yang sama memastikan jumlah penduduk kota Yogyakarta. Warga KK yang terdaftar secara administratif di Dukcapil belum tentu berdomisili di kota Jogjakarta. Selain itu, penurunan jumlah penduduk pada tahun 2020 juga disebabkan oleh meningkatnya angka kematian selama pandemi Covid19.

2. Sosial, ekonomi, budaya

A. Tingkat pendidikan masyarakat kota yogyakarta

Kualitas pembangunan suatu daerah dapat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM ini memberikan gambaran tentang akses

penduduk terhadap hasil pembangunan pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Skor IPM kota Yogyakarta merupakan yang tertinggi di Indonesia sejak tahun 2010. Kualitas pendidikan masyarakat di kota Yogyakarta tercermin dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah menunjukkan lama sekolah penduduk yang berumur lebih dari 25 tahun, sedangkan perkiraan tahun sekolah digunakan untuk memprediksi harapan sekolah di masa depan, yang dapat diinterpolasi dengan melihat proporsi rata-rata setiap kelompok umur. saat ini bersekolah. Rata-rata lama sekolah di Kota Yogyakarta dari tahun 2017 sampai sekarang selalu lebih tinggi dari rata-rata provinsi D.I. Yogyakarta dan nasional. Hal ini menunjukkan tingkat pendidikan kota Yogyakarta cukup baik dibandingkan dengan daerah lain (Laporan Kinerja Kota Yogyakarta 2020). Rata-rata penduduk kota Yogyakarta mengenyam pendidikan 12 tahun sampai SMA. Pada tahun 2021, jumlah lulusan pendidikan tinggi, Diploma III, pendidikan dasar akan meningkat 1/2/3 derajat dibandingkan tahun lalu.

B. Tingkat kesejahteraan masyarakat kota yogyakarta

Rasio ketergantungan, atau rasio ketergantungan, adalah angka yang menyatakan jumlah tanggungan pada kelompok usia produktif relatif terhadap penduduk usia tidak produktif. Rasio pemeliharaan ini berarti bahwa untuk setiap 100 orang usia kerja (working age), terdapat 46-47 orang yang belum produktif dan/atau dianggap tidak produktif lagi. Rasio pemeliharaan di kota Yogyakarta dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 secara umum stabil di angka 0,46 atau 0,47

Tabel 2. 3 rasio ketergantungan periode 2016-2021 Kota Yogyakarta

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Penduduk Usia<15 Tahun	89.552	88.800	88.299	87.880	86.127	85.653
2	Jumlah Penduduk Usia>64 Tahun	29.442	30.807	31.991	33.616	35.513	35.963
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) dan (2)	118.964	119.607	120.290	121.496	121.640	121.616
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 Tahun	258.541	259.361	258.678	260.739	260.630	262.406
5	Rasio Ketergantungan	0.46	0,46	0,47	0,47	0,47	0,46

Sumber: Hasil Analisis dari Open Data Kependudukan dalam portal Jogja Smart

Service

Dari Tabel diatas Rasio Ketergantungan Tahun 2016-2021 Kota Yogyakarta dimana jumlah penduduk berdasarkan usia maupun usia produktif dan produktif mengalami peningkatan selama lima tahun dari tahun 2016-2021 di Kota Yogyakarta

Menurut RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2021, arah kebijakan pembangunan ekonomi Kota Yogyakarta adalah masyarakat Kota Yogyakarta yang sejahtera, berbudaya dan bernilai berdasarkan penguatan ekonomi, lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan daerah. Salah satu aspek kesejahteraan sosial adalah pertumbuhan

C. Kesehatan masyarakat

Tujuan Pembangunan Kesehatan Kota Yogyakarta adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat pada setiap masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Langkah-langkah optimal telah diambil di sektor kesehatan, sektor swasta

dan berbagai sektor untuk mencapai tujuan ini. Untuk mencapai tujuan tersebut, program-program berikut dilaksanakan:

1. Program dasar pelayanan kesehatan
2. Program pelayanan kesehatan
3. Program kerja pelayanan kesehatan
4. Program Kesehatan Masyarakat
5. Regulasi dan Program Pengembangan Sumber Daya Kesehatan
6. Program pencegahan dan pengendalian penyakit

Kota Yogyakarta. Jumlah penderita penyakit tidak menular di Kota Yogyakarta bervariasi dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Hipertensi, diabetes, asma, gangguan jiwa berat, gagal ginjal, dan anemia merupakan enam penyakit tidak menular terbanyak di Yogyakarta. Jumlah penderita penyakit tidak menular yaitu hipertensi sangat tinggi. Padahal, antara tahun 2015 hingga 2019, rata-rata 21.941 orang menderita penyakit tersebut setiap tahunnya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil data analisis yang sudah dijabarkan diatas terkait “Relasi Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Melaksanakan Kebijakan Zero Sampah”, maka penulis menyimpulkan hasil dari data diatas. Berikut saya akan menjabarkan bagaimana hasil akhir dari penelitian ini:

1. Kemampuan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mendorong kepatuhan warga pada gerakan zero sampah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta terhadap masyarakat tidak berjalan dengan baik dimana Pemerintah Kota Yogyakarta hanya sekedar melakukan sosialisasi saja terkait pengelolaan dan pemilahan sampah organik dan anorganik kepada masyarakat melalui RT/RW. Padahal peran dan tugas Pemerintah agar masyarakatnya memahami kebijakan zero sampah ini seharusnya tidak hanya sekedar melakukan sosialisasi saja tetapi mereka berharap adanya fasilitas sarana prasarana dari Pemerintah kepada masyarakat berupa tempat sampah ditiap lingkungan RT/RW dan menghidupkan kembali bank sampah.

2. Pemerintah Kota Yogyakarta dalam membangun relasi dua arah kepada warga di wilayah Kota Yogyakarta

Usaha Pemerintah Kota Yogyakarta dalam membangun relasi dua arah kepada warga itu sudah dilakukan dan sangat baik dimana Pemerintah Kota Yogyakarta melibatkan Seluruh OPD/Instansi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta (Dinas; Kecamatan; Kelurahan; Sekolah; dan

Kegiatan/usaha) Dilingkungan masyarakat mereka juga melakukan sosialisasi terkait kebijakan zero sampah memang sudah berjalan dan sudah dilakukan ditiap RT/RW tetapi di lingkungan masyarakat mereka hanya sekedar melakukan kegiatan sosialisasi saja mengenai pemilahan dan pengelolaan padahal masyarakatnya sudah melaksanakan pemilahan dan pengelolaan sampah dengan melauai bank sampah bahkan sebelum zero sampah ini diberlakukan.

3. Tindakan ketidakpatuhan bagi masyarakat jika tidak patuh dalam melaksanakan gerakan zero sampah

Tindakan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta itu sangat penting dan sangat baik juga mendapatkan respon yang positif dari masyarakat dimana dengan adanya tindakan ketidakpatuhan ini diharapkan semua masyarakat Kota Yogyakarta bisa melaksanakan zero sampah. Seharusnya tindakan ketidakpatuhan ini tidak hanya diberlakukan kepada masyarakat melainkan seluruh masyarakat Kota Yogyakarta baik itu dari dinas atau instansi di Kota Yogyakarta.

B. SARAN

1. Untuk Pemerintah Kota Yogyakarta

Jika melakukan Sosialisasi kepada masyarakat harus dilakukan terus-menerus dan sosialisasi juga bisa dilakukan dengan berbagai cara dengan memanfaatkan teknologi sekarang seperti melakukan video terkait zero sampah dan pengelolaan sampah juga mendorong pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait kebijakan zero sampah. Pemerintah juga memberikan dan menyediakan fasilitas sarana prasarana berupa tempat sampah dilingkungan masyarakat dan melakukan kerjasama yang kuat

dengan bank sampah mengingat bank sampah sudah banyak di Kota Yogyakarta berupa memfasilitasi apa yang diperlukan dari bank sampah. Memberikan apresiasi kepada masyarakat jika mereka patuh melaksanakan zero sampah berupa melakukan event atau perlombaan tiap RT/RW terkait zero sampah dan kebersihan lingkungan jangan hanya tau memberi sanksi tapi tidak memberikan apresiasi jangan membuat kebijakan untuk memberatkan masyarakat harus ada keuntungan dimasing-masing pihak berupa Pemerintah dan Masyarakat.

2. Untuk Bagian Pengelola

Diharapkan untuk bagian pengelola beserta pengurusnya mampu memaksimalkan jam kerja jangan hanya bekerja dengan semauanya yang asal buka tutup dan jam kerjanya tidak teratur. Pengelolaa juga ikut bekerja jika ada sampah yang belum dipilah sampah organik dan anorganik jangan hanya melihat saja apalagi mereka digaji percuma masyarakat membayar pajak tetapi kinerja kerja mereka tidak memuaskan. Memperhatikan truk liar atau gerobak liar setiap kali membuang sampah mengingat banyak sekali pembuang liar yang asal membuang sampah disetiap depo. Jika mereka bisa mengatur jam kerja dengan baik masyarakatnya juga pasti ikut melaksanakan kebijakan zero sampah asalkan mereka juga bisa bekerja dengan baik.

3. Untuk Masyarakat Sekitar

Masyarakat diharapkan untuk mengurangi rasa malas tau dan tidak peduli terhadap kebijakan zero sampah ini mengingat zero sampah diharapkan bisa mengurangi angka jumlah sampah di Kota Yogyakarta yang sekarang makin menumpuk jika angka jumlah sampah di Kota

Yogyakarta bisa berkurang bisa menambah dan merasa sayang dan bangga dengan Kota Yogyakarta karna bebas dari sampah dan meningkatkan kebersihan lingkungan sehingga enak dilihat.

DAFTAR PUSTAKA

- Nugroho, A. (2016). Buku *Relasi Kuasa dalam Strategi Pertanahan di Desa Prigelan*. STPN Press. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=CLRoD8gAAAAJ&citation_for_view=CLRoD8gAAAAJ:0EnyYjriUFMC.
- Ps, T. P. (2008). Buku *Penanganan dan pengolahan sampah*. Penebar Swadaya Grup. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=TP.PS.+Buku.+2008+Penanganan+dan+Pengelolaan+Sampah &btnG=.
- Abuddin, M. (2017). Buku *Memahami Kekuasaan Politik*. Universitas Brawijaya Press. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=YfLj9bcAAAAJ&citation_for_view=YfLj9bcAAAAJ:_FxGoFyzp5QC.
- M. Ramdhan. 2021. Buku, *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=hHmqJW8AAAAJ&citation_for_view=hHmqJW8AAAAJ:VOx2b1Wkg3QC.
- Affandy, N. (2015). *Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah komprehensif menuju zero waste*. In Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Terapan III (pp. 803-814). https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=tyszAuAAAAAJ&citation_for_view=tyszAuAAAAAJ:qjMakFHDy7sC.
- Agusta, I. (2003). *Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor, 27(10). https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=+I.+Agusta.+2003.+Teknik+pengumpulan+dan+analisis+data+kualitatif.&btnG=.
- Azka Ramadhan. 2023. *Pemkot Yogyakarta Keluarkan SE Gerakan Zero Sampah Anorganik, Resmi Diterapkan Mulai Januari 2023*, <https://jogja.tribunnews.com/2022/12/18/>.
- Damanhuri, E., & Padmi, T. (2010). *Pengelolaan sampah*. Diktat kuliah TL, 3104, 5-10. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=c_dpKZcAAAAJ&citation_for_view=c_dpKZcAAAAJ:ULOm3_A8WrAC.
- Dobiki, J. (2018). *Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan Di Pulau Kumo Dan Pulau Kakara Di Kabupaten Halmahera Utara*. Spasial, 5(2), 220-228. <https://doi.org/10.35793/sp.v5i2.20803>.
- Edi, F. R. S. (2016). *teori wawancara Psikodignostik*. Penerbit LeutikaPrio. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=ieac0q0AAAAJ&citation_for_view=ieac0q0AAAAJ:d1gkVwhDpl0C.
- Fariris, G. S. (2014). *Kajian Transformasi Sustainable Tourism Melalui Konsep Zero Waste Family*. (Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia), 1(1), 78-102. <https://journal.uny.ac.id/index.php/jipsindo>.
- Hasanah, H. (2017). *Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial)*. At-Taqaddum, 8(1), 21-46. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/attaqaddum/article/view/1163>.
- Hendra, Y. (2016). *Perbandingan sistem pengelolaan sampah di Indonesia dan Korea Selatan: kajian 5 aspek pengelolaan sampah*. *Aspirasi: Jurnal Masalah-*

- masalah Sosial, 7(1), 77-91.
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/1281>.
- Kahfi, A. (2017). *Tinjauan terhadap pengelolaan sampah*. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 4(1), 12-25.
<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i1.3661>.
- Lindriati, S. (2017). *Pengaruh Sosialisasi Dan Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Minat Pembuatan Akta Kematian Di Desa Purworejo Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran*. <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/27789>.
- Malau R. (2021). *Konsep Legitimasi Kekuasaan Dalam Pemikiran Franz Magnis Suseno* (Doctoral dissertation, Universitas Siliwangi).
<http://repositori.unsil.ac.id/5489/6/BAB%20II.pdf>.
- Marbun, S. F. (1996). *Pemerintahan Berdasarkan Kekuasaan dan Otoritas*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 3(6), 28-43.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=JptSRikAAAAJ&citation_for_view=JptSRikAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC.
- Manik, J. D. N. (2013). *Kekuasaan dan kepemimpinan sebagai proses sosial dalam masyarakat*. *Society*, 1(1), 64-74.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=CI4K5xkAAAAJ&citation_for_view=CI4K5xkAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC.
- Mariati, R. (2012). *Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur* (Doctoral dissertation, UAJY). <http://e-journal.uajy.ac.id/358/3/2MIH01330.pdf>.
- Pramudianto, H. (2017). *Keseimbangan Kekuasaan dan Pengaruh dalam Konteks Komunikasi Organisasi*. In PROSIDING SEMINAR NASIONAL & INTERNASIONAL. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/view/3150>.
- Prasetyo, D. (2019). *Memahami masyarakat dan perspektifnya*. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 1(1), 163-175.
<https://doi.org/10.38035/jmpis.v1i1.253>.
- Putra, E., Siregar, N. A., & Siregar, J. A. (2022). *Pengenalan Gaya Hidup Zero Waste Terhadap Siswa Sekolah Dasar*. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 225-231.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=8W0AuAUAAAAJ&citation_for_view=8W0AuAUAAAAJ:2osOgNQ5qMEC.
- Rijali, A. (2019). *Analisis data kualitatif. Al Hadharah*: *Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81-95.
<https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/alhadharah/article/view/2374>.
- Setyawarni, T., & Muyana, A. I. (2023). *Hubungan Hukum Dan Kekuasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. *Dinamika Hukum & Masyarakat*, 6(1).
[file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/HUBUNGAN+HUKUM+DAN+KEKUA+SAAN+DALAM+SISTEM+HUKUM+DI+INDONESIA%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/HUBUNGAN+HUKUM+DAN+KEKUA+SAAN+DALAM+SISTEM+HUKUM+DI+INDONESIA%20(2).pdf).
- Sukmadinata, S. N. (2005). *Metode penelitian*. Bandung: PT remaja rosdakarya. http://a-research.upi.edu/operator/upload/t_pd_0908073_chapter3.pdf.

- Suryadi, H. (2014). *Fungsi Pemerintah Dalam Pelayanan Publik*. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 1(2), 1-13. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=H.+Suryadi+fungsi+pemerintah++dalam+pelayanan+publik &btnG=.
- Suwendra, I. W. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif dalam ilmu sosial, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan*. Nilachakra. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=eequJZwAAAAJ&citation_for_view=eequJZwAAAAJ:UeHWp8X0CEIC.
- UA. Gusti. 2017. *Peluang Citizen Science Project Sebagai Solusi Berkelanjutan Permasalahan Sampah di Indonesia*. Hal, 1-5. https://sampahlaut.id/wp-content/uploads/2022/12/Essai_Utari-Akhir-Gusti_Universitas-PendidikanIndonesia_Citizen-Science-Project-Utari-AG.pdf.
- Widiarti, I. W. (2012). *Pengelolaan sampah berbasis zero waste skala rumah tangga secara mandiri*. Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan, 4(2), 101-113. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=kSIV_QAAAAJ&citation_for_view=kSIV_QAAAAJ:u-x6o8ySG0sC.

Undangan-Undang

- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan turunannya, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Peraturan Presiden No. 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan sampah sejenis sampah rumah tangga (SSRT).
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah pada pasal 1 adalah sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas rumah tangga maupun sampah sejenis rumah tangga.
- Surat Edaran (SE) walikota Yogyakarta Nomor 660/6123/SE/2022 Kebijakan Zero Sampah ini dibuat diharapkan dapat mengurangi angka jumlah penumpukan sampah di Yogyakarta dan untuk mengurangi jumlah volume sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA).
- Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah telah diubah dengan Peraturan Daerah Yogyakarta (PERDA) Nomor 1 Tahun 2022



Foto depo Mandala Krida Kota Yogyakarta dengan pemasukan sampah tiap hari 4 truk dan juga daya tampung sebanyak 4 truk tiap hari



Truk pengangkut sampah



Foto depo timoho dengan warga yang membuang sampah



Foto depan Kantor DLH Kota Yogyakarta



Fasilitas disetiap ruangan kantor DLH Kota Yogyakarta

Foto diatas merupakan contoh fasilitas berupa tempat sampah yang harus ada di setiap kantor Kota Yogyakarta dan bukan hanya dikantor Kota Yogyakarta dilingkungan masyarakat di Kota Yogyakarta juga harus menyediakan sampah di Kota Yogyakarta sebagai cara melaksanakan kebijakan zero sampah.



Foto wawancara dengan Mbak Wulandari (staf bidang bidang pengelolaan sampah)



Foto wawancara dengan Mbak Nurul (staf bidang pengelolaan sampah)



Foto wawancara dengan Pak Bejoriyanto (bagian pengelolaan sampah didepo)



Foto wawancara dengan Pak Lilik (Ketua RT 30)



Foto wawancara dengan Ibu Reni (Bu RT 73)



Foto wawancara dengan Pak Juni Purwanto



Bank Sampah Blazent Jl. Taman Siswa, RW.7, Gunungketur, Pakualaman, Kota Yogyakarta



Tempat Sampah depan Rumah Warga



Bank Sampah Lestari dengan Fasilitasnya

PEDOMAN WAWANCARA

Identitas Informan

Nama :

Jenis Kelamin :

Umur :

Jabatan :

Untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota (DLH) Yogyakarta

4. Siapa saja yang terlibat dalam pemerintahan Kota Kogyakarta yang mampu mendorong niat warga untuk melaksanakan zero sampah?
5. Tahap apa saja yang digunakan pemerintah Kota Yogyakarta agar warganya patuh untuk melalukan zero sampah?
6. Faktor apa saja yang menunjang keberlangsungan gerakan pemerintah dalam mewujutkan kepatuhan warga Kota Yogyakarta?
7. Apakah ada sanksi dari pemerintah kepada masarakat! Sanksi apa saja yang diberlakukan agar mampu memberikan efek jera kepada masarakat Kota Yogyakarta?
8. Aspek apa saja yang dituju pemerintah DLH Yogyakarta dalam melakukan gerakan Zero sampah di kota Yogya?

Untuk Bagian Pengelola

1. Setelah dilakukan gerakan Zero Waste di Kota Yogyakarta bagaimanakah peran warga dalam berpartisipasi menjaga lingkungan dari sampah?
2. Alternatif apa saja yang digunakan dalam pengelompokan jenis sampah?

3. Bagaimanakah jenis dan pekerjaan pegawai pengelola dalam mewujudkan gerakan Zero sampah di Kota Yogyakarta?
4. Faktor apa saja yang menunjang keberlangsungan pegawai pengelola dalam mewujudkan kepatuhan warga kota Yogyakarta?
5. Tahap apa saja yang dilakukan pegawai pengelola agar warganya patuh untuk melakukan zero sampah?

Untuk Masyarakat Sekitar

1. Apa yang dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta yang merupakan gerakan awal zero sampah untuk masyarakatnya?
2. Apa saja manfaat dan tujuan dari kebijakan zero sampah yang dilakukan di Kota Yogyakarta?
3. Upaya apa yang dilakukan pemerintah kota Yogyakarta agar terlaksananya gerakan zero sampah?
4. Apa saja kendala dan permasalahan anda atau warga Kota Yogyakarta dalam mewujudkan gerakan Zero Waste?
5. Apakah gerakan zero sampah merupakan upaya maksimal pemerintah Kota Yogyakarta agar menjaga lingkungan bebas dari sampah?

